

Yth.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19/SEOJK.05/2014
TENTANG
LAPORAN BULANAN
PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Sehubungan dengan amanat ketentuan Pasal 16 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Oleh Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai bentuk dan susunan laporan bulanan pengelolaan program jaminan kesehatan bagi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
3. Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan adalah laporan pengelolaan program yang meliputi periode tanggal 1 sampai dengan akhir bulan berjalan dan disampaikan sesuai dengan bentuk dan susunan Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan dan menurut tata cara yang ditentukan oleh OJK.

II. BENTUK ...

II. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

1. BPJS Kesehatan wajib menyusun Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan untuk periode yang berakhir pada 31 Januari, 28 atau 29 Februari, 31 Maret, 30 April, 31 Mei, 30 Juni, 31 Juli, 31 Agustus, 30 September, 31 Oktober, 30 November, dan 31 Desember.
2. Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan meliputi:
 - a. laporan profil, yang terdiri atas:
 - 1) profil umum;
 - 2) profil dewan pengawas dan direksi;
 - 3) profil struktur organisasi;
 - 4) profil kantor;
 - 5) profil tingkat pendidikan pegawai; dan
 - 6) profil tenaga ahli.
 - b. laporan rekapitulasi, yang terdiri atas:
 - 1) rekapitulasi kepesertaan;
 - 2) rekapitulasi iuran;
 - 3) rekapitulasi klaim;
 - 4) rekapitulasi pemberi kerja;
 - 5) rekapitulasi fasilitas kesehatan;
 - 6) rekapitulasi keluhan;
 - 7) rekapitulasi pembayaran kapitasi;
 - 8) rekapitulasi koordinasi manfaat; dan
 - 9) rekapitulasi target kepesertaan, iuran, dan jumlah pemberi kerja.
3. BPJS Kesehatan wajib memiliki sistem informasi yang mampu mengolah dan memelihara data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
4. Bentuk dan susunan serta pedoman penyusunan laporan profil sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
5. Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan harus disertai dengan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab

atas ...

atas Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan yang tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

6. Data pendukung laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

III. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

1. BPJS Kesehatan wajib menyampaikan Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan kepada OJK paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada angka 1 jatuh pada hari libur, Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan wajib disampaikan pada hari kerja pertama setelah hari libur dimaksud.

IV. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

1. Penyampaian Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan dilakukan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada OJK, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk laporan profil dan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas Laporan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Bulanan disampaikan dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. untuk laporan profil dan laporan rekapitulasi disampaikan dalam bentuk *softcopy*.
2. Penyampaian Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi dan ditujukan kepada:

Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710.

3. Penyampaian Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
 - a. diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 - b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau
 - c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.
4. Penyampaian Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan dalam bentuk *softcopy* sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilakukan secara elektronik (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
5. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 4 belum tersedia, Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan disampaikan melalui surat elektronik (*email*) resmi BPJS Kesehatan dengan melampirkan *softcopy* laporan profil dan laporan rekapitulasi dalam format *spreadsheet* ke alamat *email* lkb.bpjskes@ojk.go.id.
6. BPJS Kesehatan dinyatakan telah menyampaikan Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau melalui *email* sebagaimana dimaksud pada angka 5, dibuktikan dengan *email* tanda terima dari OJK.
 - b. untuk penyampaian dalam bentuk *hardcopy*, dibuktikan dengan:
 - 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2; atau
 - 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan huruf c.
7. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau perubahan alamat *email* OJK sebagaimana dimaksud pada angka 5, OJK akan menyampaikan

perubahan ...

perubahan alamat tersebut melalui surat atau pengumuman.

V. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Desember 2014

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum,

Ttd.

Ttd.

Sudarmaji

FIRDAUS DJAELANI

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 6 TANGGAL 20
JANUARI 2015

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19/SEOJK.05/2014

TENTANG

LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

BAB I

PENJELASAN UMUM

I. 1. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam buku pedoman ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka:

1. Pengawasan Eksternal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
2. Pemenuhan keperluan internal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wajib menyampaikan laporan secara benar dan lengkap sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

I. 2. PENYAJIAN DATA

Laporan pengelolaan program jaminan kesehatan harus disajikan secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, laporan pengelolaan program jaminan kesehatan harus disajikan dalam mata uang rupiah.

I. 3. PENGISIAN FORMULIR LAPORAN

Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara lengkap dan sesuai dengan permintaan per *field*.

I. 4. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

Apabila dalam pelaksanaan penyusunan pelaporan terdapat hal-hal yang kurang jelas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dapat menyampaikan pertanyaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710, telepon 021-3858001, faksimili 021-3847437.

BAB II

**LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
BAGI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

**I.1. PROFIL UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN**

1. Nama Institusi :

2. Alamat Perusahaan
 - a. Alamat Lengkap :
 - b. Status Pemilikan Gedung :
 - c. Sandi Lokasi :
 - d. Nama Kota :
 - e. Kode Pos :

3. Telepon dan Faksimili
 - a. Telepon :
 - b. Faksimili :

4. Website :

5. NPWP :

6. Jumlah Kantor
 - a. Jumlah Kantor Divisi Regional :
 - b. Jumlah Kantor Cabang :

7. Jumlah Pegawai
 - a. Kantor Pusat :
 - b. Kantor Divisi Regional :
 - c. Kantor Cabang :
 - d. Total :

8. Nama Aktuaris :
9. Kepengurusan
- a. Jumlah Direksi :
- b. Jumlah Dewan
Pengawas :
10. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan

Penanggung Jawab

- a. Nama Lengkap :
- b. Jabatan : Direktur
- c. Telepon :
- d. Faksimili :
- e. Email :

Penyusun

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Unit Kerja :
- d. Telepon :
- e. Faksimili :
- f. Email :

Jakarta,

Penanggung Jawab Laporan

Nama

Direktur

I.2. PENJELASAN PROFIL UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai profil kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

1. Nama Institusi

Diisi dengan Nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

2. Alamat Perusahaan

a. Alamat Lengkap

Diisi dengan alamat lengkap sesuai domisili kantor pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

b. Status Pemilikan Gedung

Diisi dengan status pemilikan gedung, yaitu sewa, milik sendiri, atau pinjam pakai.

c. Sandi Lokasi

Diisi dengan sandi lokasi kabupaten/kota sesuai domisili kantor pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

d. Nama Kota

Diisi dengan nama kota sesuai domisili kantor pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

e. Kode Pos

Diisi dengan nomor kode pos domisili kantor pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3. Telepon dan Faksimili

a. Telepon

Diisi dengan nomor telepon Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

b. Faksimili

Diisi dengan nomor faksimili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

4. Website

Diisi dengan alamat website Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

5. NPWP

Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

6. Jumlah Kantor
 - a. Jumlah Kantor Divisi Regional
Diisi dengan jumlah kantor Divisi Regional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
 - b. Jumlah Kantor Cabang
Diisi dengan jumlah Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
7. Jumlah Pegawai
 - a. Kantor Pusat
Diisi dengan jumlah pegawai di Kantor Pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
 - b. Kantor Divisi Regional
Diisi dengan jumlah pegawai di Kantor Divisi Regional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
 - c. Jumlah Kantor Cabang
Diisi dengan jumlah pegawai di Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
 - d. Total
Diisi dengan jumlah seluruh pegawai di Kantor Pusat, Kantor Divisi Regional, dan Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
8. Nama Aktuaris
Diisi dengan nama aktuaris yang melakukan penghitungan aktuarial di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada tahun yang bersangkutan.
9. Kepengurusan
 - a. Jumlah Direksi
Diisi dengan banyaknya jumlah Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
 - b. Jumlah Dewan Pengawas
Diisi dengan banyaknya jumlah Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
10. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan
Diisi dengan data lengkap masing-masing personil yang bertindak sebagai petugas penyusun dan pejabat penanggung jawab laporan.

a. Penanggung Jawab

1) Nama Lengkap

Diisi dengan nama lengkap penanggung jawab laporan.

2) Jabatan

Diisi dengan jabatan Direktur di bidang tertentu yang menjadi penanggung jawab laporan, misalnya Direktur Keuangan.

3) Telepon

Diisi dengan nomor telepon penanggung jawab laporan.

4) Faksimili

Diisi dengan nomor faksimili penanggung jawab laporan.

5) Email

Diisi dengan alamat email penanggung jawab laporan.

b. Penyusun

1) Nama

Diisi dengan nama penyusun laporan.

2) Jabatan

Diisi dengan jabatan penyusun laporan.

3) Unit Kerja

Diisi dengan unit kerja penyusun laporan.

4) Telepon

Diisi dengan nomor telepon penyusun laporan.

5) Faksimili

Diisi dengan nomor faksimili penyusun laporan.

6) Email

Diisi dengan alamat email penyusun laporan.

II.1 PROFIL DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

a. Profil Dewan Pengawas

Periode Laporan	Nama Dewan Pengawas	Nomenklatur Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Nomor SK Pengangkatan	Tanggal SK	Perihal SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

b. Profil Direksi

Periode Laporan	Nama Direksi	Nomenklatur Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Nomor SK Pengangkatan	Tanggal SK	Perihal SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

II.2 PENJELASAN PROFIL DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Formulir ini berisi informasi pengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pelapor yang terdiri Dewan Pengawas dan Direksi untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Nama Dewan Pengawas/ Direksi

Diisi dengan nama-nama Dewan Pengawas/Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3. Nomenklatur Jabatan

Diisi dengan nomenklatur jabatan Dewan Pengawas/Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

4. Tanggal Mulai Menjabat

Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai menjabat.

5. Nomor SK Pengangkatan

Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi, misalnya KEP-123/MK/2013.

6. Tanggal SK

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun dikeluarkannya surat keputusan.

7. Perihal SK

Diisi dengan perihal surat keputusan pengangkatan.

III.1 PROFIL STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Periode Laporan	Nama Struktur	Nama Pejabat	Level Struktur	Nama Induk Struktur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

III.2 PENJELASAN PROFIL STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Formulir ini berisi informasi Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Nama Struktur

Diisi dengan nama-nama struktur organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, misalnya Bagian Keuangan dengan urutan dari tingkatan yang tertinggi.

3. Nama Pejabat

Diisi dengan nama pejabat yang memimpin struktur organisasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

4. Level Struktur

Diisi dengan level struktur organisasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

No.	Level Struktur	Sandi
1.	Direksi	1
2.	Grup	2
3.	Divisi Regional	3
4.	Cabang	4

5. Nama Induk Struktur

Diisi dengan nama induk struktur organisasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, misalnya Departemen Keuangan.

IV.1 PROFIL KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Periode Laporan	Jenis Kantor	Alamat Lengkap	Lokasi		Kode Pos	Telepon	Faksimili	Total Pegawai
			Sandi	Nama				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

IV.2 PENJELASAN PROFIL KANTOR BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Formulir ini berisi informasi daftar rincian profil kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal, bulan, tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Jenis Kantor

Diisi dengan Jenis Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

No.	Jenis Kantor	Sandi
1.	Kantor Divisi Regional	1
2.	Kantor Cabang	2

3. Alamat Lengkap

Diisi dengan alamat lengkap kantor sesuai domisili kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

4. Lokasi

Diisi dengan sandi dan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

5. Kode Pos

Diisi dengan nomor kode pos domisili kantor cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

6. Telepon

Diisi dengan nomor telepon Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

7. Faksimili

Diisi dengan nomor faksimili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

8. Total Pegawai

Diisi dengan jumlah seluruh pegawai tetap di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

V.1 PROFIL TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Periode Laporan	Tingkat Pendidikan	Sandi	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

V.2 PENJELASAN PROFIL TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Formulir ini berisi rincian tingkat pendidikan pegawai baik di kantor pusat maupun kantor selain kantor pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Tingkat Pendidikan

Diisi dengan tingkat pendidikan pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3. Sandi

Diisi dengan sandi tingkat pendidikan pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran.

a. Kantor Pusat

No.	Tingkat Pendidikan	Sandi
1.	SD	9110
2.	SMP	9120
3.	SMA	9130
4.	D1	9140
5.	D2	9150
6.	D3	9160
7.	S1/D4	9170
8.	S2	9180
9.	S3	9190
10.	Tenaga Asing	9200

b. Selain Kantor Pusat

No.	Tingkat Pendidikan	Sandi
1.	SD	9210
2.	SMP	9220
3.	SMA	9230
4.	D1	9240
5.	D2	9250
6.	D3	9260
7.	S1/D4	9270
8.	S2	9280
9.	S3	9290
10.	Tenaga Asing	9300

c. Laki-laki

Diisi dengan jumlah pegawai laki-laki sesuai tingkat pendidikan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

4. Perempuan

Diisi dengan jumlah pegawai perempuan sesuai tingkat pendidikan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

5. Total

Diisi dengan jumlah total pegawai laki-laki dan perempuan sesuai tingkat pendidikan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

VI.1 PROFIL TENAGA AHLI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Periode Laporan	Bidang Keahlian	Kualifikasi	Jumlah Tenaga Ahli
(1)	(2)	(3)	(4)

VI.2 PENJELASAN PROFIL TENAGA AHLI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

Formulir ini berisi informasi daftar rincian profil tenaga ahli baik di kantor pusat maupun kantor selain kantor pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Bidang Keahlian

Diisi dengan bidang keahlian tenaga ahli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

No.	Bidang Keahlian	Sandi
1.	Aktuaria	1
2.	Akuntansi, Audit dan Keuangan	2
3.	Asuransi dan Manajemen Risiko	3
4.	Dokter	4
5.	Teknologi Informasi	5
6.	Lainnya	6

3. Kualifikasi

Diisi dengan kualifikasi tenaga ahli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

No.	Bidang Keahlian	Kualifikasi
1.	Aktuaria	FSAI/ASAI/Lainnya
2.	Akutansi, Audit dan Keuangan	CFA/WMI/CPA/ CISA/Akuntan/CA/QIA/ CFE/CIA/Lainnya
3.	Asuransi dan Manajemen Risiko	AAIJ/AAAIJ/AAIK/AAAIK /FLMI/ANZIF/ ACII/BSMR/AAK/AAAK/ CRMP/Lainnya
4.	Kesehatan	Dokter/Dokter Spesialis/Lainnya
5.	Teknologi Informasi	Vendor Spesific/Non Vendor Spesific/Lainnya
6.	Lainnya	

4. Jumlah Tenaga Ahli

Diisi dengan jumlah tenaga ahli sesuai bidang keahlian dan kualifikasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

I.2 PENJELASAN REKAPITULASI KEPESERTAAN

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai Rekapitulasi Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Lokasi

Diisi dengan sandi dan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3. Segmen Peserta

Diisi dengan segmen peserta program jaminan kesehatan.

No	Segmen Peserta	Sandi
1	2	3
A.	Penerima Bantuan Iuran	1
B.	Bukan Penerima Bantuan Iuran	
	Pekerja Penerima Upah (PPU)	
	a. PNS	2
	b. TNI/POLRI/PNS Kemhan/Polri	3
	c. Pejabat Negara (PN)	4
	d. Pegawai Pemerintah Non PNS	5
	e. Pegawai Swasta/BUMN/Lainnya	6
	f. Pekerja Penerima Upah selain a) - e)	7
	g. Warga Asing bekerja \geq 6 bulan	8
	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	
	a. Pekerja Mandiri (PM)	9
	b. PBPU selain PM	10
	Bukan Pekerja (BP)	
	a. Investor	11
	b. Pemberi Kerja	12
	c. Penerima Pensiun (PP)	13
	d. Veteran	14
	e. Perintis Kemerdekaan (PK)	15
	f. BP Mampu Bayar selain a) - e)	16
C.	Jamkesda dan PJKMU Askes (transisi)	17

4. Kewarganegaraan

Diisi dengan kewarganegaraan peserta program jaminan kesehatan.

No.	Kewarganegaraan	Sandi
1.	Warga Negara Indonesia	1
2.	Warga Negara Asing	2

5. Status Tanggungan

Diisi dengan status tanggungan kepesertaan.

No.	Status Tanggungan	Sandi
1.	Peserta	1
2.	Suami/Istri	2
3.	Anak	3
4.	Tambahan	4

6. Kelas

Diisi dengan kelas peserta program jaminan kesehatan.

7. Peserta Baru

Diisi dengan jumlah peserta baru program jaminan kesehatan, tidak termasuk peserta yang berpindah antar segmen kepesertaan.

8. Peserta Keluar

Diisi dengan jumlah peserta keluar program jaminan kesehatan, misalnya meninggal atau tidak menjadi penduduk Indonesia.

9. Aktif

Diisi dengan jumlah peserta aktif program jaminan kesehatan.

10. Tidak Aktif

Diisi dengan jumlah peserta tidak aktif program jaminan kesehatan.

11. Total

Diisi dengan jumlah peserta aktif dan tidak aktif program jaminan kesehatan.

II.2 PENJELASAN REKAPITULASI IURAN

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi iuran.

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Sandi Lokasi

Diisi dengan sandi dan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3. Segmen Peserta

Diisi dengan segmen peserta program jaminan kesehatan.

No	Segmen Peserta	Sandi
1	2	3
A.	Penerima Bantuan Iuran	1
B.	Bukan Penerima Bantuan Iuran	
	Pekerja Penerima Upah (PPU)	
	a. PNS	2
	b. TNI/POLRI/PNS Kemhan/Polri	3
	c. Pejabat Negara (PN)	4
	d. Pegawai Pemerintah Non PNS	5
	e. Pegawai Swasta/BUMN/Lainnya	6
	f. Pekerja Penerima Upah selain a) - e)	7
	g. Warga Asing bekerja \geq 6 bulan	8
	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	
	a. Pekerja Mandiri (PM)	9
	b. PBPU selain PM	10
	Bukan Pekerja (BP)	
	a. Investor	11
	b. Pemberi Kerja	12
	c. Penerima Pensiun (PP)	13
	d. Veteran	14
	e. Perintis Kemerdekaan (PK)	15
	f. BP Mampu Bayar selain a) - e)	16
C.	Jamkesda dan PJKMU Askes (transisi)	17

4. Kelas

Diisi dengan kelas peserta program jaminan kesehatan.

5. Kategori Piutang Iuran

Diisi dengan kategori piutang iuran program jaminan kesehatan.

No.	Kategori	Sandi
1.	Kategori 1: ≤ 3 bulan	1
2.	Kategori 2: >3 - 6 bulan	2
3.	Kategori 3: >6 - 12 bulan	3
4.	Kategori 4: >12 bulan	4

6. Total Iuran Jatuh Tempo

Diisi dengan total iuran yang sudah jatuh tempo pada tanggal pelaporan, termasuk akumulasi iuran periode sebelumnya yang belum dibayarkan.

7. Iuran Dibayarkan

Diisi dengan total iuran yang dibayarkan pada periode pelaporan, termasuk tunggaknya (jika ada).

III.1 REKAPITULASI KLAIM

Periode Laporan	Lokasi		Jenis Fasilitas Kesehatan	Kelas	Jenis Klaim	Detail Klaim	Nilai klaim	
	Sandi	Nama					Jumlah Kasus	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

III.2 PENJELASAN REKAPITULASI KLAIM

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Lokasi

Diisi dengan sandi dan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3. Jenis Fasilitas Kesehatan

Diisi dengan jenis fasilitas kesehatan program jaminan kesehatan.

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Sandi
1.	FKTP - Puskesmas	10
2.	FKTP - Dokter Praktik Perorangan	11
3.	FKTP - Klinik Pratama	12
4.	FKTP - Rumah Sakit Kelas D-Pratama	13
5.	FKTP - Apotik	14
6.	FKTP - Lainnya	15
7.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas A	16
8.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas B	17
9.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas C	18
10.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas D	19
11.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas A	20
12.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas B	21
13.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas C	22
14.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas D	23
15.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat I	24
16.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat II	25
17.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat III	26
18.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat IV	27
19.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat I	28
20.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat II	29
21.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat III	30
22.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat IV	31
23.	FKRTL - Rumah Sakit Khusus Non Jiwa	32
24.	FKRTL - Rumah Sakit Khusus Jiwa	34
25.	FKTL - Klinik Utama	35
26.	FKTL - Apotik	36
27.	FKTL - Optik	37
28.	FKTL - Lainnya	38

4. Kelas

Diisi dengan kelas peserta program jaminan kesehatan.

No.	Jenis Klaim	Sandi
1.	Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Kapitasi	1
2.	Klaim Non Kapitasi	2
3.	Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)	3
4.	Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) Ina CBGs	4
5.	Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) Ina CBGs	5
6.	Klaim Non Ina CBGs	6

5. Detail Klaim

Diisi dengan detail klaim berdasarkan klaim tersering dan biaya terbesar program jaminan kesehatan.

6. Nilai Klaim

Diisi dengan jumlah kasus dan nilai klaim yang disetujui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

IV.1 REKAPITULASI PEMBERI KERJA

Periode Laporan	Lokasi		<i>Counterparty</i>	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	Jumlah Pemberi Kerja	Jumlah Peserta
	Sandi	Nama				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)

IV.2 PENJELASAN REKAPITULASI PEMBERI KERJA

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi pemberi kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Sandi Lokasi

Diisi dengan sandi dan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3. *Counterparty*

Diisi dengan *counterparty* peserta program jaminan kesehatan.

4. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Diisi dengan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

5. Jumlah Pemberi Kerja

Diisi dengan jumlah pemberi kerja pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

6. Jumlah Peserta

Diisi dengan jumlah peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

V.2 PENJELASAN REKAPITULASI FASILITAS KESEHATAN

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi fasilitas kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Sandi Lokasi

Diisi dengan sandi dan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3. Jenis Fasilitas Kesehatan

Diisi dengan jenis fasilitas kesehatan program jaminan kesehatan.

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Sandi
1.	FKTP - Puskesmas	10
2.	FKTP - Dokter Praktik Perorangan	11
3.	FKTP - Klinik Pratama	12
4.	FKTP - Rumah Sakit Kelas D-Pratama	13
5.	FKTP - Apotik	14
6.	FKTP - Lainnya	15
7.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas A	16
8.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas B	17
9.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas C	18
10.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas D	19
11.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas A	20
12.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas B	21
13.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas C	22
14.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas D	23
15.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat I	24
16.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat II	25
17.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat III	26
18.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat IV	27
19.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat I	28
20.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat II	29
21.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat III	30
22.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat IV	31
23.	FKRTL - Rumah Sakit Khusus Non Jiwa	32
24.	FKRTL - Rumah Sakit Khusus Jiwa	33
25.	FKTL - Klinik Utama	34
26.	FKTL - Apotik	35
27.	FKTL - Optik	36
28.	FKTL - Lainnya	37

VI.2 PENJELASAN REKAPITULASI KELUHAN

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi keluhan peserta program jaminan kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

1. No

Diisi dengan nomor urut keluhan.

2. Unit Kerja

Diisi dengan unit kerja yang menangani keluhan.

3. Lisan

Diisi dengan jumlah keluhan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara lisan, yaitu:

- a. datang ke kantor BPJS kesehatan;
- b. telepon reguler;
- c. hotline service;
- d. mobile customer service;
- e. BPJS center;
- f. pusat layanan informasi BPJS kesehatan 500400; dan
- g. pelayanan lainnya.

4. Tertulis

Diisi dengan jumlah keluhan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara tertulis, yaitu:

- a. website;
- b. email;
- c. surat;
- d. media massa; dan
- e. pelayanan lainnya.

5. Jumlah Keluhan

Diisi dengan jumlah seluruh keluhan peserta program jaminan kesehatan yang disampaikan secara lisan dan tertulis.

6. Pokok Masalah Keluhan

Diisi dengan jumlah untuk setiap pokok masalah keluhan, yaitu:

- a. pelayanan administrasi;
- b. pelayanan medis;
- c. pelayanan obat; dan
- d. pelayanan lainnya.

7. Jumlah

Diisi dengan jumlah seluruh pokok masalah keluhan yang disampaikan peserta program jaminan kesehatan.

8. Jumlah Keluhan Diselesaikan

Diisi dengan jumlah keluhan yang telah diselesaikan.

9. %

Diisi dengan persentase perbandingan antara jumlah keluhan diselesaikan dan jumlah pokok masalah keluhan.

10. Rata-rata Penyelesaian (hari)

Diisi dengan jangka waktu rata-rata penyelesaian keluhan peserta program jaminan kesehatan.

VII.1 REKAPITULASI PEMBAYARAN KAPITASI

Periode Laporan	Lokasi		Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Peserta Terdaftar	Total Nilai Kapitasi Yang Dibayarkan
	Sandi	Nama			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)

VII.2 PENJELASAN REKAPITULASI PEMBAYARAN KAPITASI

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi pembayaran kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Lokasi

Diisi dengan sandi dan nama lokasi kabupaten/kota sesuai sistem aplikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

3. Jenis Fasilitas Kesehatan

Diisi dengan jenis fasilitas kesehatan program jaminan kesehatan.

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Sandi
1.	FKTP - Puskesmas	10
2.	FKTP - Dokter Praktik Perorangan	11
3.	FKTP - Klinik Pratama	12
4.	FKTP - Rumah Sakit Kelas D-Pratama	13
5.	FKTP - Apotik	14
6.	FKTP - Lainnya	15
7.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas A	16
8.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas B	17
9.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas C	18
10.	FKTL - Rumah Sakit Pemerintah Kelas D	19
11.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas A	20
12.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas B	21

13.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas C	22
14.	FKTL - Rumah Sakit Swasta Kelas D	23
15.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat I	24
16.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat II	25
17.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat III	26
18.	FKTL - Rumah Sakit TNI Tingkat IV	27
19.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat I	28
20.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat II	29
21.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat III	30
22.	FKTL - Rumah Sakit POLRI Tingkat IV	31
23.	FKRTL – Rumah Sakit Khusus Non Jiwa	32
24.	FKRTL – Rumah Sakit Khusus Jiwa	33
25.	FKTL - Klinik Utama	34
26.	FKTL – Apotik	35
27.	FKTL – Optik	36
28.	FKTL – Lainnya	37

4. Jumlah Peserta Terdaftar

Diisi dengan jumlah peserta yang terdaftar pada program jaminan kesehatan.

5. Total Nilai Kapitasi Yang Dibayarkan

Diisi dengan total nilai kapitasi yang dibayarkan.

IX.2 PENJELASAN REKAPITULASI TARGET KEPESERTAAN, IURAN, DAN JUMLAH PEMBERI KERJA

Formulir ini berisi seluruh informasi mengenai rekapitulasi target kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

1. Periode Laporan

Diisi dengan tanggal bulan tahun akhir periode laporan yang disampaikan.

2. Periode Target

Diisi dengan periode target kepesertaan dalam hitungan bulan dan tahun.

3. Segmen Peserta

Diisi dengan segmen peserta program jaminan kesehatan.

No	Segmen Peserta	Sandi
1	2	3
A.	Penerima Bantuan Iuran	1
B.	Bukan Penerima Bantuan Iuran	
	Pekerja Penerima Upah (PPU)	
	a. PNS	2
	b. TNI/POLRI/PNS Kemhan/Polri	3
	c. Pejabat Negara (PN)	4
	d. Pegawai Pemerintah Non PNS	5
	e. Pegawai Swasta/BUMN/Lainnya	6
	f. Pekerja Penerima Upah selain a) - e)	7
	g. Warga Asing bekerja \geq 6 bulan	8
	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)	
	a. Pekerja Mandiri (PM)	9
	b. PBPU selain PM	10
	Bukan Pekerja (BP)	
	a. Investor	11
	b. Pemberi Kerja	12
	c. Penerima Pensiun (PP)	13
	d. Veteran	14
	e. Perintis Kemerdekaan (PK)	15
	f. BP Mampu Bayar selain a) - e)	16
C.	Jamkesda dan PJKMU Askes (transisi)	17

4. Lokasi

Diisi dengan sandi dan nama lokasi target peserta program jaminan kesehatan berdomisili.

5. Jumlah Peserta

Diisi dengan target jumlah peserta program jaminan kesehatan.

6. Jumlah Pemberi kerja

Diisi dengan target jumlah pemberi kerja program jaminan kesehatan.

7. Nilai Iuran

Diisi dengan target nilai iuran yang diterima Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum,

FIRDAUS DJAELANI

Ttd.

Sudarmaji

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19/SEOJK.05/2014

TENTANG

LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

CONTOH SURAT PERNYATAAN DIREKSI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
Tentang
Tanggung Jawab Atas Laporan Bulanan
Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan
Per...
BPJS Kesehatan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan bagi BPJS Kesehatan.
2. Semua informasi dalam Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan bagi BPJS Kesehatan telah disajikan secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan bagi BPJS Kesehatan tidak mengandung informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta,

Nama Pejabat
Jabatan

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum,

Ttd.

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Sudarmaji

LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19/SEOJK.05/2014

TENTANG

LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

DATA PENDUKUNG LAPORAN BULANAN PENGELOLAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Dalam lampiran ini diuraikan mengenai data pendukung Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan.

Laporan Bulanan Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan meliputi laporan profil dan laporan rekapitulasi. Laporan profil terdiri atas profil umum, profil dewan pengawas dan direksi, profil struktur organisasi, profil kantor, profil tingkat pendidikan pegawai, dan profil tenaga ahli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang dilaporkan dalam laporan pengelolaan program jaminan kesehatan.

Laporan rekapitulasi terdiri atas rekapitulasi kepesertaan, rekapitulasi iuran, rekapitulasi klaim, rekapitulasi pemberi kerja, rekapitulasi fasilitas kesehatan, rekapitulasi keluhan, rekapitulasi pembayaran kapitasi, rekapitulasi koordinasi manfaat, dan rekapitulasi target kepesertaan, iuran, dan jumlah pemberi kerja.

Untuk informasi mengenai data pendukung laporan rekapitulasi, diuraikan sebagai berikut:

I. Data Pendukung Laporan Rekapitulasi Kepesertaan antara lain:

1. periode laporan;
2. nomor peserta;
3. jenis kelamin;
4. tanggal lahir;
5. lokasi tinggal peserta (sesuai dengan tabel lokasi);
6. warga negara;
7. status peserta;
8. lokasi pendaftaran (sesuai dengan tabel lokasi);
9. tipe tanggungan;
10. segmen peserta;
11. kelas;
12. tanggal pendaftaran;
13. status keanggotaan;
14. nama pemberi kerja; dan
15. *counterparty* (sesuai dengan tabel *counterparty*).

II. Data Pendukung Laporan Rekapitulasi Iuran antara lain:

1. periode laporan;
2. nomor peserta;
3. nama pemberi kerja;
4. pendapatan peserta per bulan;
5. iuran beban peserta;
6. iuran beban pemberi kerja;
7. iuran jatuh tempo;
8. piutang iuran;
9. masa piutang iuran;
10. masa iuran dibayarkan; dan
11. saldo iuran.

III. Data Pendukung Laporan Rekapitulasi Klaim antara lain:

1. periode laporan;
2. nama provider;
3. nama peserta;
4. tipe tanggungan;
5. tanggal mulai kejadian;
6. tanggal selesai kejadian;
7. tanggal pengajuan klaim;
8. jenis klaim;
9. detail klaim;
10. nilai klaim dilaporkan;
11. status klaim;
12. tanggal penetapan klaim;
13. nilai klaim disetujui;
14. tanggal pembayaran; dan
15. nilai klaim dibayar.

IV. Data Pendukung Laporan Rekapitulasi Pemberi Kerja antara lain:

1. periode laporan;
2. nama pemberi kerja;
3. *counterparty* (sesuai dengan tabel *counterparty*);
4. lokasi (sesuai dengan tabel lokasi);
5. tanggal pendaftaran;
6. tanggal rekonsiliasi terakhir;

7. klasifikasi baku lapangan usaha; dan
8. jumlah peserta.

V. Data Pendukung Laporan Rekapitulasi Fasilitas Kesehatan antara lain:

1. periode laporan;
2. nama provider;
3. sandi jenis fasilitas kesehatan;
4. alamat;
5. kodepos;
6. telepon;
9. lokasi (sesuai dengan tabel lokasi); dan
7. koneksi internet ke BPJS Kesehatan.

VI. Data Pendukung Laporan Rekapitulasi Keluhan antara lain:

1. periode laporan;
2. jenis keluhan;
3. nama pelapor;
4. nomor induk kependudukan;
5. alamat;
6. lokasi kantor BPJS Kesehatan (sesuai dengan tabel lokasi);
7. lokasi kejadian (sesuai dengan tabel lokasi);
8. tanggal penyampaian;
9. channel penyampaian;
10. jenis program;
11. kategori/jenis keluhan;
12. isi keluhan;
13. respon bpjs;
14. tanggal respon;
15. diisi dengan tanggal respon;
16. kategori respon;
17. ketepatan respon; dan
18. sengketa konsumen.

VII. Data Pendukung Laporan Rekapitulasi Pembayaran Kapitasi antara lain:

1. periode laporan;
2. penerima dana kapitasi;
3. cakupan jumlah peserta;

4. tanggal pembayaran kapitasi;
5. masa pelayanan; dan
6. nilai kapitasi yang dibayarkan.

VIII. Data Pendukung Laporan Rekapitulasi Koordinasi Manfaat antara lain:

1. periode laporan;
2. nama peserta;
3. nama pemberi kerja;
4. jumlah peserta per pemberi kerja;
5. nomor polis asuransi;
6. iuran per peserta ke BPJS Kesehatan; dan
7. klaim per peserta.

IX. Data Pendukung Laporan Rekapitulasi Target Kepesertaan, Iuran, dan Jumlah Pemberi Kerja antara lain:

1. periode laporan;
2. nama peserta;
3. nama pemberi kerja;
4. lokasi (sesuai dengan tabel lokasi);
5. iuran beban peserta; dan
6. iuran beban pemberi kerja.

Tabel Lokasi

KODE	DATI	NAMA
11	PROVINSI	ACEH
11.01	KAB	KAB. ACEH SELATAN
11.02	KAB	KAB. ACEH TENGGARA
11.03	KAB	KAB. ACEH TIMUR
11.04	KAB	KAB. ACEH TENGAH
11.05	KAB	KAB. ACEH BARAT
11.06	KAB	KAB. ACEH BESAR
11.07	KAB	KAB. PIDIE
11.08	KAB	KAB. ACEH UTARA
11.09	KAB	KAB. SIMEULUE
11.10	KAB	KAB. ACEH SINGKIL
11.11	KAB	KAB. BIREUEN
11.12	KAB	KAB. ACEH BARAT DAYA
11.13	KAB	KAB. GAYO LUES
11.14	KAB	KAB. ACEH JAYA
11.15	KAB	KAB. NAGAN RAYA
11.16	KAB	KAB. ACEH TAMIANG
11.17	KAB	KAB. BENER MERIAH
11.18	KAB	KAB. PIDIE JAYA
11.71	KOTA	KOTA BANDA ACEH
11.72	KOTA	KOTA SABANG
11.73	KOTA	KOTA LHOKSEUMAWA
11.74	KOTA	KOTA LANGSA
11.75	KOTA	KOTA SUBULUSSALAM
12	PROVINSI	SUMATERA UTARA
12.01	KAB	KAB. TAPANULI TENGAH
12.02	KAB	KAB. TAPANULI UTARA
12.03	KAB	KAB. TAPANULI SELATAN
12.04	KAB	KAB. NIAS
12.05	KAB	KAB. LANGKAT
12.06	KAB	KAB. KARO
12.07	KAB	KAB. DELI SERDANG
12.08	KAB	KAB. SIMALUNGUN
12.09	KAB	KAB. ASAHAN
12.10	KAB	KAB. LABUHANBATU
12.11	KAB	KAB. DAIRI
12.12	KAB	KAB. TOBA SAMOSIR
12.13	KAB	KAB. MANDAILING NATAL
12.14	KAB	KAB. NIAS SELATAN
12.15	KAB	KAB. PAKPAK BHARAT
12.16	KAB	KAB. HUMBANG HASUNDUTAN
12.17	KAB	KAB. SAMOSIR
12.18	KAB	KAB. SERDANG BEDAGAI
12.19	KAB	KAB. BATU BARA
12.20	KAB	KAB. PADANG LAWAS UTARA
12.21	KAB	KAB. PADANG LAWAS
12.22	KAB	KAB. LABUHANBATU SELATAN
12.23	KAB	KAB. LABUHANBATU UTARA
12.24	KAB	KAB. NIAS UTARA
12.25	KAB	KAB. NIAS BARAT
12.71	KOTA	KOTA MEDAN
12.72	KOTA	KOTA PEMATANG SIANTAR
12.73	KOTA	KOTA SIBOLGA
12.74	KOTA	KOTA TANJUNG BALAI
12.75	KOTA	KOTA BINJAI

12.76	KOTA	KOTA TEBING TINGGI
12.77	KOTA	KOTA PADANGSIDIMPUAN
12.78	KOTA	KOTA GUNUNGSITOLI
13	PROVINSI	SUMATERA BARAT
13.01	KAB	KAB. PESISIR SELATAN
13.02	KAB	KAB. SOLOK
13.03	KAB	KAB. SIJUNJUNG
13.04	KAB	KAB. TANAH DATAR
13.05	KAB	KAB. PADANG PARIAMAN
13.06	KAB	KAB. AGAM
13.07	KAB	KAB. LIMA PULUH KOTA
13.08	KAB	KAB. PASAMAN
13.09	KAB	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
13.10	KAB	KAB. DHARMASRAYA
13.11	KAB	KAB. SOLOK SELATAN
13.12	KAB	KAB. PASAMAN BARAT
13.71	KOTA	KOTA PADANG
13.72	KOTA	KOTA SOLOK
13.73	KOTA	KOTA SAWAHLUNTO
13.74	KOTA	KOTA PADANG PANJANG
13.75	KOTA	KOTA BUKITTINGGI
13.76	KOTA	KOTA PAYAKUMBUH
13.77	KOTA	KOTA PARIAMAN
14	PROVINSI	RIAU
14.01	KAB	KAB. KAMPAR
14.02	KAB	KAB. INDRAGIRI HULU
14.03	KAB	KAB. BENGKALIS
14.04	KAB	KAB. INDRAGIRI HILIR
14.05	KAB	KAB. PELALAWAN
14.06	KAB	KAB. ROKAN HULU
14.07	KAB	KAB. ROKAN HILIR
14.08	KAB	KAB. SIAK
14.09	KAB	KAB. KUANTAN SINGINGI
14.10	KAB	KAB. KEPULAUAN MERANTI
14.71	KOTA	KOTA PEKANBARU
14.72	KOTA	KOTA DUMAI
15	PROVINSI	JAMBI
15.01	KAB	KAB. KERINCI
15.02	KAB	KAB. MERANGIN
15.03	KAB	KAB. SAROLANGUN
15.04	KAB	KAB. BATANGHARI
15.05	KAB	KAB. MUARO JAMBI
15.06	KAB	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
15.07	KAB	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR
15.08	KAB	KAB. BUNGO
15.09	KAB	KAB. TEBO
15.71	KOTA	KOTA JAMBI
15.72	KOTA	KOTA SUNGAI PENUH
16	PROVINSI	SUMATERA SELATAN
16.01	KAB	KAB. OGAN KOMERING ULU
16.02	KAB	KAB. OGAN KOMERING ILIR
16.03	KAB	KAB. MUARA ENIM
16.04	KAB	KAB. LAHAT
16.05	KAB	KAB. MUSI RAWAS
16.06	KAB	KAB. MUSI BANYUASIN
16.07	KAB	KAB. BANYUASIN

16.08	KAB	KAB. OKU TIMUR
16.09	KAB	KAB. OKU SELATAN
16.10	KAB	KAB. OGAN ILIR
16.11	KAB	KAB. EMPAT LAWANG
16.71	KOTA	KOTA PALEMBANG
16.72	KOTA	KOTA PAGAR ALAM
16.73	KOTA	KOTA LUBUK LINGGAU
16.74	KOTA	KOTA PRABUMULIH
17	PROVINSI	BENGKULU
17.01	KAB	KAB. BENGKULU SELATAN
17.02	KAB	KAB. REJANG LEBONG
17.03	KAB	KAB. BENGKULU UTARA
17.04	KAB	KAB. KAUR
17.05	KAB	KAB. SELUMA
17.06	KAB	KAB. MUKO MUKO
17.07	KAB	KAB. LEBONG
17.08	KAB	KAB. KEPAHANG
17.09	KAB	KAB. BENGKULU TENGAH
17.71	KOTA	KOTA BENGKULU
18	PROVINSI	LAMPUNG
18.01	KAB	KAB. LAMPUNG SELATAN
18.02	KAB	KAB. LAMPUNG TENGAH
18.03	KAB	KAB. LAMPUNG UTARA
18.04	KAB	KAB. LAMPUNG BARAT
18.05	KAB	KAB. TULANG BAWANG
18.06	KAB	KAB. TANGGAMUS
18.07	KAB	KAB. LAMPUNG TIMUR
18.08	KAB	KAB. WAY KANAN
18.09	KAB	KAB. PESAWARAN
18.10	KAB	KAB. PRINGSEWU
18.11	KAB	KAB. MESUJI
18.12	KAB	KAB. TULANG BAWANG BARAT
18.71	KOTA	KOTA BANDAR LAMPUNG
18.72	KOTA	KOTA METRO
19	PROVINSI	KEP. BANGKA BELITUNG
19.01	KAB	KAB. BANGKA
19.02	KAB	KAB. BELITUNG
19.03	KAB	KAB. BANGKA SELATAN
19.04	KAB	KAB. BANGKA TENGAH
19.05	KAB	KAB. BANGKA BARAT
19.06	KAB	KAB. BELITUNG TIMUR
19.71	KOTA	KOTA PANGKAL PINANG
21	PROVINSI	KEPULAUAN RIAU
21.01	KAB	KAB. BINTAN
21.02	KAB	KAB. KARIMUN
21.03	KAB	KAB. NATUNA
21.04	KAB	KAB. LINGGA
21.05	KAB	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
21.71	KOTA	KOTA BATAM
21.72	KOTA	KOTA TANJUNG PINANG
31	PROVINSI	DKI JAKARTA
31.01	KAB	KAB. ADM. KEP. SERIBU
31.71	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT
31.72	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA UTARA
31.73	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA BARAT
31.74	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

31.75	KOTA	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
32	PROVINSI	JAWA BARAT
32.01	KAB	KAB. BOGOR
32.02	KAB	KAB. SUKABUMI
32.03	KAB	KAB. CIANJUR
32.04	KAB	KAB. BANDUNG
32.05	KAB	KAB. GARUT
32.06	KAB	KAB. TASIKMALAYA
32.07	KAB	KAB. CIAMIS
32.08	KAB	KAB. KUNINGAN
32.09	KAB	KAB. CIREBON
32.10	KAB	KAB. MAJALENGKA
32.11	KAB	KAB. SUMEDANG
32.12	KAB	KAB. INDRAMAYU
32.13	KAB	KAB. SUBANG
32.14	KAB	KAB. PURWAKARTA
32.15	KAB	KAB. KARAWANG
32.16	KAB	KAB. BEKASI
32.17	KAB	KAB. BANDUNG BARAT
32.71	KOTA	KOTA BOGOR
32.72	KOTA	KOTA SUKABUMI
32.73	KOTA	KOTA BANDUNG
32.74	KOTA	KOTA CIREBON
32.75	KOTA	KOTA BEKASI
32.76	KOTA	KOTA DEPOK
32.77	KOTA	KOTA CIMAH
32.78	KOTA	KOTA TASIKMALAYA
32.79	KOTA	KOTA BANJAR
33	PROVINSI	JAWA TENGAH
33.01	KAB	KAB. CILACAP
33.02	KAB	KAB. BANYUMAS
33.03	KAB	KAB. PURBALINGGA
33.04	KAB	KAB. BANJARNEGARA
33.05	KAB	KAB. KEBUMEN
33.06	KAB	KAB. PURWOREJO
33.07	KAB	KAB. WONOSOBO
33.08	KAB	KAB. MAGELANG
33.09	KAB	KAB. BOYOLALI
33.10	KAB	KAB. KLATEN
33.11	KAB	KAB. SUKOHARJO
33.12	KAB	KAB. WONOGIRI
33.13	KAB	KAB. KARANGANYAR
33.14	KAB	KAB. SRAGEN
33.15	KAB	KAB. GROBOGAN
33.16	KAB	KAB. BLORA
33.17	KAB	KAB. REMBANG
33.18	KAB	KAB. PATI
33.19	KAB	KAB. KUDUS
33.20	KAB	KAB. JEPARA
33.21	KAB	KAB. DEMAK
33.22	KAB	KAB. SEMARANG
33.23	KAB	KAB. TEMANGGUNG
33.24	KAB	KAB. KENDAL
33.25	KAB	KAB. BATANG
33.26	KAB	KAB. PEKALONGAN
33.27	KAB	KAB. PEMALANG

33.28	KAB	KAB. TEGAL
33.29	KAB	KAB. BREBES
33.71	KOTA	KOTA MAGELANG
33.72	KOTA	KOTA SURAKARTA
33.73	KOTA	KOTA SALATIGA
33.74	KOTA	KOTA SEMARANG
33.75	KOTA	KOTA PEKALONGAN
33.76	KOTA	KOTA TEGAL
34	PROVINSI	DAISTA YOGYAKARTA
34.01	KAB	KAB. KULON PROGO
34.02	KAB	KAB. BANTUL
34.03	KAB	KAB. GUNUNG KIDUL
34.04	KAB	KAB. SLEMAN
34.71	KOTA	KOTA YOGYAKARTA
35	PROVINSI	JAWA TIMUR
35.01	KAB	KAB. PACITAN
35.02	KAB	KAB. PONOROGO
35.03	KAB	KAB. TRENGGALEK
35.04	KAB	KAB. TULUNGAGUNG
35.05	KAB	KAB. BLITAR
35.06	KAB	KAB. KEDIRI
35.07	KAB	KAB. MALANG
35.08	KAB	KAB. LUMAJANG
35.09	KAB	KAB. JEMBER
35.10	KAB	KAB. BANYUWANGI
35.11	KAB	KAB. BONDOWOSO
35.12	KAB	KAB. SITUBONDO
35.13	KAB	KAB. PROBOLINGGO
35.14	KAB	KAB. PASURUAN
35.15	KAB	KAB. SIDOARJO
35.16	KAB	KAB. MOJOKERTO
35.17	KAB	KAB. JOMBANG
35.18	KAB	KAB. NGANJUK
35.19	KAB	KAB. MADIUN
35.20	KAB	KAB. MAGETAN
35.21	KAB	KAB. NGAWI
35.22	KAB	KAB. BOJONEGORO
35.23	KAB	KAB. TUBAN
35.24	KAB	KAB. LAMONGAN
35.25	KAB	KAB. GRESIK
35.26	KAB	KAB. BANGKALAN
35.27	KAB	KAB. SAMPANG
35.28	KAB	KAB. PAMEKASAN
35.29	KAB	KAB. SUMENEP
35.71	KOTA	KOTA KEDIRI
35.72	KOTA	KOTA BLITAR
35.73	KOTA	KOTA MALANG
35.74	KOTA	KOTA PROBOLINGGO
35.75	KOTA	KOTA PASURUAN
35.76	KOTA	KOTA MOJOKERTO
35.77	KOTA	KOTA MADIUN
35.78	KOTA	KOTA SURABAYA
35.79	KOTA	KOTA BATU
36	PROVINSI	BANTEN
36.01	KAB	KAB. PANDEGLANG
36.02	KAB	KAB. LEBAK

36.03	KAB	KAB. TANGERANG
36.04	KAB	KAB. SERANG
36.71	KOTA	KOTA TANGERANG
36.72	KOTA	KOTA CILEGON
36.73	KOTA	KOTA SERANG
36.74	KOTA	KOTA TANGERANG SELATAN
51	PROVINSI	BALI
51.01	KAB	KAB. JEMBRANA
51.02	KAB	KAB. TABANAN
51.03	KAB	KAB. BADUNG
51.04	KAB	KAB. GIANYAR
51.05	KAB	KAB. KLUNGKUNG
51.06	KAB	KAB. BANGLI
51.07	KAB	KAB. KARANGASEM
51.08	KAB	KAB. BULELENG
51.71	KOTA	KOTA DENPASAR
52	PROVINSI	NUSA TENGGARA BARAT
52.01	KAB	KAB. LOMBOK BARAT
52.02	KAB	KAB. LOMBOK TENGAH
52.03	KAB	KAB. LOMBOK TIMUR
52.04	KAB	KAB. SUMBAWA
52.05	KAB	KAB. DOMPU
52.06	KAB	KAB. BIMA
52.07	KAB	KAB. SUMBAWA BARAT
52.08	KAB	KAB. LOMBOK UTARA
52.71	KOTA	KOTA MATARAM
52.72	KOTA	KOTA BIMA
53	PROVINSI	NUSA TENGGARA TIMUR
53.01	KAB	KAB. KUPANG
53.03	KAB	KAB. TIMOR TENGAH UTARA
53.04	KAB	KAB. BELU
53.05	KAB	KAB. ALOR
53.06	KAB	KAB. FLORES TIMUR
53.07	KAB	KAB. SIKKA
53.08	KAB	KAB. ENDE
53.09	KAB	KAB. NGADA
53.10	KAB	KAB. MANGGARAI
53.11	KAB	KAB. SUMBA TIMUR
53.12	KAB	KAB. SUMBA BARAT
53.13	KAB	KAB. LEMBATA
53.14	KAB	KAB. ROTE NDAO
53.15	KAB	KAB. MANGGARAI BARAT
53.16	KAB	KAB. NAGEKEO
53.17	KAB	KAB. SUMBA TENGAH
53.18	KAB	KAB. SUMBA BARAT DAYA
53.19	KAB	KAB. MANGGARAI TIMUR
53.20	KAB	KAB. SABU RAIJUA
53.71	KOTA	KOTA KUPANG
61	PROVINSI	KALIMANTAN BARAT
61.01	KAB	KAB. SAMBAS
61.02	KAB	KAB. PONTIANAK
61.03	KAB	KAB. SANGGAU
61.04	KAB	KAB. KETAPANG
61.05	KAB	KAB. SINTANG
61.06	KAB	KAB. KAPUAS HULU
61.07	KAB	KAB. BENGKAYANG

61.08	KAB	KAB. LANDAK
61.09	KAB	KAB. SEKADAU
61.10	KAB	KAB. MELAWI
61.11	KAB	KAB. KAYONG UTARA
61.12	KAB	KAB. KUBU RAYA
61.71	KOTA	KOTA PONTIANAK
61.72	KOTA	KOTA SINGKAWANG
62	PROVINSI	KALIMANTAN TENGAH
62.01	KAB	KAB. KOTAWARINGIN BARAT
62.02	KAB	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
62.03	KAB	KAB. KAPUAS
62.04	KAB	KAB. BARITO SELATAN
62.05	KAB	KAB. BARITO UTARA
62.06	KAB	KAB. KATINGAN
62.07	KAB	KAB. SERUYAN
62.08	KAB	KAB. SUKAMARA
62.09	KAB	KAB. LAMANDAU
62.10	KAB	KAB. GUNUNG MAS
62.11	KAB	KAB. PULANG PISAU
62.12	KAB	KAB. MURUNG RAYA
62.13	KAB	KAB. BARITO TIMUR
62.71	KOTA	KOTA PALANGKARAYA
63	PROVINSI	KALIMANTAN SELATAN
63.01	KAB	KAB. TANAH LAUT
63.02	KAB	KAB. KOTABARU
63.03	KAB	KAB. BANJAR
63.04	KAB	KAB. BARITO KUALA
63.05	KAB	KAB. TAPIN
63.06	KAB	KAB. HULU SUNGAI SELATAN
63.07	KAB	KAB. HULU SUNGAI TENGAH
63.08	KAB	KAB. HULU SUNGAI UTARA
63.09	KAB	KAB. TABALONG
63.10	KAB	KAB. TANAH BUMBU
63.11	KAB	KAB. BALANGAN
63.71	KOTA	KOTA BANJARMASIN
63.72	KOTA	KOTA BANJARBARU
64	PROVINSI	KALIMANTAN TIMUR
64.01	KAB	KAB. PASER
64.02	KAB	KAB. KUTAI KARTANEGARA
64.03	KAB	KAB. BERAU
64.04	KAB	KAB. BULUNGAN
64.05	KAB	KAB. NUNUKAN
64.06	KAB	KAB. MALINAU
64.07	KAB	KAB. KUTAI BARAT
64.08	KAB	KAB. KUTAI TIMUR
64.71	KOTA	KOTA BALIKPAPAN
64.72	KOTA	KOTA SAMARINDA
64.02	KAB	KAB. MINAHASA
64.03	KAB	KAB. KEPULAUAN SANGIHE
64.04	KAB	KAB. KEPULAUAN TALAUD
64.05	KAB	KAB. MINAHASA SELATAN
64.06	KAB	KAB. MINAHASA UTARA
64.07	KAB	KAB. MINAHASA TENGGARA
64.08	KAB	KAB. BOLAANG MONGONDOW UT
64.09	KAB	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG B
64.10	KAB	KAB. BOLAANG MONGONDOW TI

64.11	KAB	KAB. BOLAANG MONGONDOW SE
64.71	KOTA	KOTA MANADO
64.72	KOTA	KOTA BITUNG
64.73	KOTA	KOTA TOMOHON
64.74	KOTA	KOTA KOTAMOBAGU
72	PROVINSI	SULAWESI TENGAH
72.01	KAB	KAB. BANGGAI
72.02	KAB	KAB. POSO
72.03	KAB	KAB. DONGGALA
72.04	KAB	KAB. TOLI TOLI
72.05	KAB	KAB. BUOL
72.06	KAB	KAB. MOROWALI
72.07	KAB	KAB. BANGGAI KEPULAUAN
72.08	KAB	KAB. PARIGI MOUTONG
72.09	KAB	KAB. TOJO UNA UNA
72.10	KAB	KAB. SIGI
72.71	KOTA	KOTA PALU
73	PROVINSI	SULAWESI SELATAN
73.01	KAB	KAB. KEPULAUAN SELAYAR
73.02	KAB	KAB. BULUKUMBA
73.03	KAB	KAB. BANTAENG
73.04	KAB	KAB. JENEPONTO
73.05	KAB	KAB. TAKALAR
73.06	KAB	KAB. GOWA
73.07	KAB	KAB. SINJAI
73.08	KAB	KAB. BONE
73.09	KAB	KAB. MAROS
73.10	KAB	KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN
73.11	KAB	KAB. BARRU
73.12	KAB	KAB. SOPPENG
73.13	KAB	KAB. WAJO
73.14	KAB	KAB. SIDENRENG RAPPANG
73.15	KAB	KAB. PINRANG
73.16	KAB	KAB. ENREKANG
73.17	KAB	KAB. LUWU
73.18	KAB	KAB. TANA TORAJA
73.18	KAB	KAB. POLEWALI MAMASA
73.18	KAB	KAB. MAJENE
73.18	KAB	KAB. MAMUJU
73.22	KAB	KAB. LUWU UTARA
73.22	KAB	KAB. MAMASA
73.24	KAB	KAB. LUWU TIMUR
73.24	KAB	KAB. MAMUJU UTARA
73.26	KAB	KAB. TORAJA UTARA
73.71	KOTA	KOTA MAKASSAR
73.72	KOTA	KOTA PARE PARE
73.73	KOTA	KOTA PALOPO
74	PROVINSI	SULAWESI TENGGARA
74.01	KAB	KAB. KOLAKA
74.02	KAB	KAB. KONawe
74.03	KAB	KAB. MUNA
74.04	KAB	KAB. BUTON
74.05	KAB	KAB. KONawe SELATAN
74.06	KAB	KAB. BOMBANA
74.07	KAB	KAB. WAKATOBI
74.08	KAB	KAB. KOLAKA UTARA

74.09	KAB	KAB. KONAWA UTARA
74.10	KAB	KAB. BUTON UTARA
74.71	KOTA	KOTA KENDARI
74.72	KOTA	KOTA BAU BAU
75	PROVINSI	GORONTALO
75.01	KAB	KAB. GORONTALO
75.02	KAB	KAB. BOALEMO
75.03	KAB	KAB. BONE BOLANGO
75.04	KAB	KAB. PAHUWATO
75.05	KAB	KAB. GORONTALO UTARA
75.71	KOTA	KOTA GORONTALO
76	PROVINSI	SULAWESI BARAT
76.01	KAB	KAB. MAMUJU UTARA
76.02	KAB	KAB. MAMUJU
76.03	KAB	KAB. MAMASA
76.04	KAB	KAB. POLEWALI MANDAR
76.05	KAB	KAB. MAJENE
81	PROVINSI	MALUKU
81.01	KAB	KAB. MALUKU TENGAH
81.02	KAB	KAB. MALUKU TENGGARA
81.04	KAB	KAB. BURU
81.05	KAB	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
81.06	KAB	KAB. SERAM BAGIAN BARAT
81.07	KAB	KAB. KEPULAUAN ARU
81.08	KAB	KAB. MALUKU BARAT DAYA
81.09	KAB	KAB. BURU SELATAN
81.71	KOTA	KOTA AMBON
81.72	KOTA	KOTA TUAL
82	PROVINSI	MALUKU UTARA
82.01	KAB	KAB. HALMAHERA BARAT
82.02	KAB	KAB. HALMAHERA TENGAH
82.03	KAB	KAB. HALMAHERA UTARA
82.04	KAB	KAB. HALMAHERA SELATAN
82.05	KAB	KAB. KEPULAUAN SULA
82.06	KAB	KAB. HALMAHERA TIMUR
82.07	KAB	KAB. PULAU MOROTAI
82.71	KOTA	KOTA TERNATE
82.72	KOTA	KOTA TIDORE KEPULAUAN
91	PROVINSI	P A P U A
91.01	KAB	KAB. MERAUKE
91.02	KAB	KAB. JAYAWIJAYA
91.03	KAB	KAB. JAYAPURA
91.04	KAB	KAB. NABIRE
91.05	KAB	KAB. KEPULAUAN YAPEN
91.06	KAB	KAB. BIAK NUMFOR
91.07	KAB	KAB. PUNCAK JAYA
91.08	KAB	KAB. PANIAI
91.09	KAB	KAB. MIMIKA
91.10	KAB	KAB. SARMI
91.11	KAB	KAB. KEEROM
91.13	KAB	KAB. YAHUKIMO
91.14	KAB	KAB. TOLIKARA
91.15	KAB	KAB. WAROPEN
91.16	KAB	KAB. BOVEN DIGOEL
91.17	KAB	KAB. MAPPI
91.18	KAB	KAB. ASMAT

91.19	KAB	KAB. SUPIORI
91.20	KAB	KAB. MAMBERAMO RAYA
91.21	KAB	KAB. MAMBERAMO TENGAH
91.22	KAB	KAB. YALIMO
91.23	KAB	KAB. LANNY JAYA
91.24	KAB	KAB. NDUGA
91.25	KAB	KAB. PUNCAK
91.26	KAB	KAB. DOGIYAI
91.27	KAB	KAB. INTAN JAYA
91.28	KAB	KAB. DEIYAI
91.71	KOTA	KOTA JAYAPURA
92	PROVINSI	PAPUA BARAT
92.01	KAB	KAB. SORONG
92.02	KAB	KAB. MANOKWARI
92.03	KAB	KAB. FAK FAK
92.04	KAB	KAB. SORONG SELATAN
92.05	KAB	KAB. RAJA AMPAT
92.06	KAB	KAB. TELUK BINTUNI
92.07	KAB	KAB. TELUK WONDAMA
92.08	KAB	KAB. KAIMANA
92.09	KAB	KAB. TAMBRAUW
92.10	KAB	KAB. MAYBRAT
92.71	KOTA	KOTA SORONG

Tabel Counterparty

Counterparty		Sandi
A. Penduduk		
I.	Sektor Pemerintah	
1.	Pemerintah Pusat	
a.	Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)	0010
b.	Kementerian Keuangan	0020
c.	Kementerian Pertahanan	0030
d.	Kementerian Kehutanan	0040
e.	Kementerian Pertanian	0050
f.	Kementerian Pertambangan dan Energi	0060
g.	Kementerian Agama	0070
h.	Kementerian Negara BUMN	0080
i.	Kementerian lainnya	0999
2.	Pemerintah Daerah (Pemda)	
a.	Provinsi	1010
b.	Pemerintah Kota	1020
c.	Pemerintah Kabupaten	1030
3.	Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah	
a.	Badan Urusan Logistik (BULOG)	2010
b.	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	2020
c.	Lainnya	2090
4.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Pemerintah Campuran	
a.	Lembaga Keuangan Bank	
i.	Bank Umum Konvensional	6110
ii.	Bank Umum Syariah	6120
iii.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional	6130
iv.	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah	6140
b.	Lembaga Keuangan Non Bank	
i.	Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun	
	Asuransi :	
-	Jamsostek	4111
-	Taspen	4112
-	Jiwasraya	4113
-	Jasa Raharja	4114
-	Jasindo	4115
-	ASABRI	4116
-	Perusahaan asuransi lainnya	4119
	Dana Pensiun	4120
ii.	Modal Ventura	4130
iii.	Perusahaan Pembiayaan	4140
iv.	Perusahaan Sekuritas dan Reksadana	
-	Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana	4151
-	Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana	4152
-	Perusahaan Reksadana	4153
-	Manajer Investasi	4154
-	PT Danareksa	4155
-	Lainnya	4159
v.	Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya	
-	Perum Pegadaian	4171
-	PT Pos Indonesia	4172
-	Lainnya	4179
c.	Bukan Lembaga Keuangan	
i.	PT Kereta Api Indonesia (KAI)	4501
ii.	PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)	4502
iii.	PT Pelabuhan Laut Indonesia (PELINDO)	4503
iv.	PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)	4504
v.	PT Angkasa Pura	4505
vi.	PT Perkebunan Nusantara	4506
vii.	PT Pertamina	4507
viii.	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	4508
ix.	PT Krakatau Steel	4509
x.	PT Garuda Indonesia	4510
xi.	PT Telkom	4511
xii.	PT Indosat	4512
xiii.	PT Jasa Marga	4513
xiv.	PT Timah	4514
xv.	PT Aneka Tambang	4515

xvi. Perusahaan Jasa Konstruksi	4516
xvii. Lainnya	4599
5. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
a. Lembaga Keuangan Non Bank	
i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun	
- Perusahaan Asuransi	5110
- Dana Pensiun	5120
ii. Modal Ventura	5130
iii. Perusahaan Pembiayaan	5140
iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana	
- Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha reksadana	5151
- Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha reksadana	5152
- Perusahaan Reksadana	5153
- Manajer Investasi	5154
- Lainnya	5159
v. Lainnya	5199
b. Bukan Lembaga Keuangan	
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	5501
- Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar)	5502
- Lainnya	5599
II. Sektor Swasta	
1. Lembaga Keuangan Bank	
a. Bank Umum Konvensional	6110
b. Bank Umum Syariah	6120
c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional	6130
d. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah	6140
2. Lembaga Keuangan Non Bank	
a. Swasta Nasional	
i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun	
- Perusahaan Asuransi	7110
- Dana Pensiun	7120
ii. Modal Ventura	7130
iii. Perusahaan Pembiayaan	7140
iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana	
- Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana	7151
- Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana	7152
- Perusahaan Reksadana	7153
- Manajer Investasi	7154
- Lainnya	7159
v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya	
- Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	7172
- Koperasi Simpan Pinjam	
= Koperasi Primer	7173
= Koperasi Lainnya	7174
- Lainnya	7190
b. Campuran	
i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun	
- Perusahaan Asuransi	7210
- Dana Pensiun	7220
ii. Modal Ventura	7230
iii. Perusahaan Pembiayaan	7240
iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana	
- Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana	7251
- Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana	7252
- Perusahaan Reksadana	7253
- Manajer Investasi	7254
- Lainnya	7259
v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya	
- Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	7272
- Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia lainnya	7273
- Lainnya	7290
c. Asing	
i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun	
- Perusahaan Asuransi	7310
- Dana Pensiun	7320
ii. Modal Ventura	7330
iii. Perusahaan Pembiayaan	7340
iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana	
- Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana	7351

- Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana	7352
- Perusahaan Reksadana	7353
- Manajer Investasi	7354
- Lainnya	7359
v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya	
- Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	7372
- Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia lainnya	7379
- Lainnya	7390
3. Bukan Lembaga Keuangan	
a. Swasta Nasional	
i. Perusahaan-perusahaan Lainnya	
- Perusahaan Otomotif	8111
- Perusahaan Perminyakan	8112
- Perusahaan Tekstil	8113
- Perusahaan Perkayuan (HPH)	8114
- Perusahaan Jasa Konstruksi	8115
- Perusahaan Industri Rokok	8116
- Perusahaan Industri Makanan	8117
- Perusahaan Agrobusiness	8118
- Perusahaan Lainnya	8139
ii. Koperasi Bukan Simpan Pinjam	
- Koperasi Primer	8141
- Koperasi Lainnya	8149
iii. Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	
- Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)	8151
- Lembaga Pendidikan	8152
- Lainnya	8159
b. Campuran	
i. Perusahaan-perusahaan Lainnya	
- Perusahaan Otomotif	8411
- Perusahaan Perminyakan	8412
- Perusahaan Tekstil	8413
- Perusahaan Perkayuan (HPH)	8414
- Perusahaan Jasa Konstruksi	8415
- Perusahaan Industri Rokok	8416
- Perusahaan Industri Makanan	8417
- Perusahaan Agrobusiness	8418
- Perusahaan Lainnya	8449
ii. Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	
- Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)	8451
- Lembaga Pendidikan	8452
- Lainnya	8469
iii. Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia	8480
c. Asing	
i. Perusahaan-perusahaan Lainnya	
- Perusahaan Otomotif	8611
- Perusahaan Perminyakan	8612
- Perusahaan Tekstil	8613
- Perusahaan Perkayuan (HPH)	8614
- Perusahaan Jasa Konstruksi	8615
- Perusahaan Industri Rokok	8616
- Perusahaan Industri Makanan	8617
- Perusahaan Agrobisnis	8618
- Perusahaan Lainnya	8619
ii. Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	
- Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS)	8651
- Lembaga Pendidikan	8652
- Lainnya	8659
iii. Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia	8670
4. Sektor Swasta Lainnya	8900
5. Perseorangan	9000
B. Bukan penduduk	
I. Pemerintah pusat	9100
II. Perwakilan negara-negara asing dan stafnya	9200
III. BUMN Milik Negara Asing	9300
IV. Lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang beroperasi di luar Indonesia	9400
V. Swasta Lainnya	
1. Swasta Patungan Indonesia dan Negara Asing	9501
2. Swasta Milik Indonesia	9502

	3. Lainnya	9519
VI.	Lembaga-Lembaga Internasional	
	1. Bank Pembangunan Multilateral :	
	a. Islamic Development Bank (IDB)	9611
	b. Asian Development Bank (ADB)	9612
	c. World Bank	9613
	d. lainnya	9629
	2. Lainnya	9690
VII.	Perseorangan	9700

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum,

Ttd.

Sudarmaji